

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis mencoba memilih judul “PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMILU PRESIDEN MESIR 2005” dengan alasan :

Pertama, penulis tertarik dengan pemilu pertama kali di Mesir dengan sistem multikandidat. Penulis menganggap pemilu ini sebagai transisi demokrasi yang terjadi di Timur Tengah pada umumnya dan Mesir pada khususnya. Oleh karena itu momentum seperti ini patut untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan studi yang sedang ditekuni penulis yaitu tentang ilmu hubungan internasional.

Kedua, penulis mengambil objek penelitian pada budaya partisipasi rakyat Mesir yang berubah dari sistem Referendum ke sistem Multikandidat.

Ketiga, penulis melihat bahwa judul yang penulis ajukan belum pernah ditulis oleh penulis lain.

Dengan ketiga alasan diatas itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penyebab Rendahnya Partisipasi Rakyat dalam Pemilu Presiden

## **B. Tujuan Penulisan**

1. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada guna memperoleh jawaban sekaligus membuktikan hipotesa yang di susun oleh penulis.
2. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang pemilu pertama di Mesir dengan sistem Multikandidat.
3. Penulisan ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran tentang pola partisipasi pemilu di Mesir.
4. Selain itu penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama di bangku kuliah.
5. Penulisan ini merupakan suatu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Sejak Republik Mesir dideklarasikan pada tanggal 18 Juni 1953, secara resmi Kerajaan Mesir di bubarkan dan diganti sistem Republik yang lebih pada pembagian kekuasaan kepada rakyat dan bukan lagi terpusat pada raja. Penggulingan rezim ini dilakukan oleh Jenderal Muhammad Naguib yang kemudian diangkat menjadi Presiden pertama Mesir. Setahun kemudian Presiden Naguib digulingkan oleh Gamal Abdul Nasser. Sejak diterapkannya sistem Republik pasca revolusi tahun 1952, mulai dibentuk Konstitusi Mesir. Dalam perkembangannya, Konstitusi Mesir mengalami 3 perubahan.

Amandemen konstitusi juga sering mengalami perubahan/perbaikan sesuai dengan tuntutan jaman. Amandemen yang terakhir yang dilakukan pada pasal 76 Konstitusi Mesir tahun 1980 yang berisi tentang sistem pemilihan Presiden melalui referendum yaitu sistem dimana warga hanya di suruh untuk menyatakan “ya” atau “tidak” pada Presiden tunggal yang ditunjuk oleh parlemen.<sup>1</sup>

Pada pasca revolusi 1952 Mesir di bawah pimpinan Presiden Gamal Abdul Nasser menghindarkan tumbuhnya sistem multipartai. Oleh karena itu Nasser membentuk Arab Socialist Union (ASU) sebagai wadah organisasi politik dan aspirasi rakyat. Organisasi ini lebih menekankan pada perjuangan untuk kesadaran pada Pan Arabisme. Dan tidak dipungkiri pembentukan Pan Arabisme ini harus didukung oleh pemimpin yang lebih memihak pada rakyat. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan warga Mesir pada pemilu Presiden yang tidak pernah kurang dari 60%.<sup>2</sup>

Pada masa Presiden Anwar Saddat barulah banyak bermunculan partai politik dari berbagai aspirasi. Hal ini terlihat dari diberlakukannya sistem multipartai. Jumlah partai-partai politik semakin berkembang jumlahnya dalam masa kepemimpinan Hosni Mubarak. Sehingga aspirasi rakyat Mesir semakin banyak terwakilkan dibandingkan pada masa Presiden Nasser.

---

<sup>1</sup> Rumadi, artikel “*Angin Demokrasi Berhembus di Mesir*”, dalam [Http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2262&Itemid=0](http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2262&Itemid=0), akses tanggal 19 Oktober 2005

<sup>2</sup> Independent UK, artikel “*Kuasa di Timur Tengah : Fir’aun Modern*”, dalam <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/kuasa-di-timur-tengah-fir-aun-modern.htm>, akses

Presiden Hosni Mubarak pada awal masa jabatannya lebih menitikberatkan perhatiannya pada masalah ekonomi dalam negeri dengan jalan melanjutkan kebijaksanaan pintu terbuka (infitah) yang sudah dirintis oleh Anwar Saddat. Hal ini menyebabkan Hosni Mubarak semakin mendapat kepercayaan yang besar dari rakyat. Hal ini dibuktikan perolehan suara pemilu yang cukup tinggi sekitar 90%.<sup>3</sup> Pada awal masa jabatannya pada tahun 1981-1987 tercatat sekitar 16 juta penduduk terdaftar sebagai pemilih, 10 juta diantaranya datang memberikan hak suaranya dan 9 juta diantaranya mendukung Hosni Mubarak.<sup>4</sup> Tingginya angka dukungan masih terlihat sampai pada tahun 1999. Pada masa jabatan 1987-1993, sekitar 19 juta penduduk terdaftar menjadi pemilih, 13 juta diantaranya datang pada pemilu Presiden, 94,4% diantaranya mendukung Hosni Mubarak.<sup>5</sup> Pada masa jabatan 1993-1999 sekitar 22 juta terdaftar sebagai pemilih, 16 juta diantaranya mendukung Hosni Mubarak.<sup>6</sup> Dan pada tahun 1999 tercatat 23.934.907 sebagai pemilih, 17.554.856 (93,79%) suara “ya” mendukung Hosni Mubarak, 1.162.525 suara “tidak” untuk Hosni Mubarak dan 240.512 suara tidak sah.<sup>7</sup>

Menjelang Pemilu Mesir 2005, terjadi banyak transformasi politik yang cukup panas. Situasi ini memperlihatkan peningkatan gelombang penentangan dari berbagai kubu politik di Mesir. Kondisi ini diperparah dengan tekanan-tekanan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Mesir. Isu-isu yang sensitif ditunjukkan pada pemerintah Mesir yang sedang berusaha

melakukan reformasi. Semua menunjukkan adanya gelombang untuk melakukan perubahan di Mesir.

Besarnya gelombang pro-reformasi membuat pemerintah Mesir terpaksa menyetujui tuntutan kaum oposisi yang dipimpin oleh Partai Al-Ghad, tuntutan itu antara lain dengan mengubah konstitusi secara keseluruhan, tapi presiden Hosni Mubarak, hanya melakukan amandemen pada pasal 76 saja. Konstitusi yang sebelumnya berdasar pasal 76 yang berisi tentang pemilihan presiden dengan pencalonan kandidat oleh parlemen, dan kandidat yang terpilih inilah yang akan maju dalam *plebsicite*. Dalam sistem *plebsicite* inilah rakyat hanya memberikan suara “ya” atau “tidak” terhadap kandidat tunggal yang ditunjuk parlemen.

Pasca amandemen konstitusi pasal 76 pada tanggal 25 Mei 2005 secara resmi peraturan berlaku dan mengalami perubahan dasar pada sistem pemilihan presiden dari referendum ke sistem multikandidat.<sup>8</sup> Dengan sistem multikandidat ini terdapat beberapa persyaratan bagaimana seseorang dapat menjadi kandidat calon presiden. Salah satunya hanya pemimpin sebuah partai yang bisa mengajukan diri sebagai kandidat presiden dalam pemilu tahun 2005. 10 kandidat yang berhasil melewati beberapa tahapan seleksi yaitu Wahid Al Uksory dari partai Arab Sosialis, Ibrahim Tork dari partai Uni demokrasi, Naoman Gomaa dari partai Wafd, Muhammad Hosni Mubarak dari partai Nasional Demokrasi, Ayman Nour dari partai Al Ghad, Osama Shaltout dari partai Solidaritas, Fawzi Ghazal partai Mesir 2000, Ahmed Al

---

<sup>8</sup> Adminpadek, artikel “Pemilu Mesir, Mubarak unggul, Golput mencapai 70 persen”, dalam

Sabhi dari partai Ummah, Mamdouh Qenawi dari partai Konstitusi Sosialis dan Refaat Al Agroudy dari partai Kesepakatan.

Masa kampanye pemilu presiden multikandidat dimulai sejak tanggal 17 Agustus 2005 sampai 4 September 2005. Semua kandidat berusaha memanfaatkan jatah satu jam kampanye tiap hari pada televisi. Selain itu, semua kandidat tampil hampir setiap hari pada televisi satelit arab, seperti Al Jazeera, Al Arabia, MBC, dan Abu Dhabi untuk mengenalkan program mereka kepada warga Mesir baik di dalam maupun di luar negeri. Karena media komunikasi di Mesir dianggap sebagai otorita ke 4 disamping 3 otorita lainnya, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>9</sup> Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan masa kampanye menunjukkan betapa kuatnya kandidat partai Nasional Demokrat yang berkuasa, yaitu Muhammad Hosni Mubarak. Pamflet-pamflet berbagai ukuran, menyatakan dukungannya kepada Mubarak. Foto dalam berbagai gaya juga bertaburan di tempat-tempat strategis ibukota Mesir. Sedangkan gambar para saingannya hampir tidak ditemukan kecuali dalam hitungan jari. Dari seluruh calon hanya Hosni Mubarak satu-satunya kandidat yang mengkampanyekan diri lewat iklan komersial. Presiden yang berkuasa sejak 1981 itu memasang program kerjanya satu halaman penuh dalam Koran lokal.

Di perkirakan banyak pengamat dan lembaga independent kalau Hosni Mubarak akan berada di urutan atas perolehan suara. Penghitungan suara

---

<sup>9</sup> Dan, Dina Sihadi, et al., *Profil Negara-Negara Timur Tengah (1)*, PT Dunia Pustaka Jaya

diperkirakan sekitar 80% diperoleh presiden “*Incumbent*” Hosni Mubarak.<sup>10</sup> Dan sisanya dibagi rata dengan dua kandidat terkuat lainnya dari partai Wafd Naoman Gomaa dan partai Al Ghad Aiman Nour.

Sementara itu, kemenangan mutlak Presiden Hosni Mubarak itu diumumkan secara resmi oleh Ketua Komisi Pemilihan Presiden yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir yaitu Mamdouh Mar'i. Ia menjelaskan pemilihan presiden yang berlangsung Rabu 7 September 2005 lalu menghasilkan Presiden Hosni Mubarak memperoleh 6.316.784 suara (88,5 %) dari total jumlah suara pemilih 7.305.630 suara (23 % dari jumlah pemilih terdaftar).<sup>11</sup> Posisi kedua ditempati Ayman Nour dari partai Al-Ghad dengan perolehan suara sejumlah 540.405 (7,6 %) dan Naoman Gomaa memperoleh 208.891 suara atau sekitar (2,9 %) dan sisanya terbagi untuk delapan Capres lainnya.<sup>12</sup> Hasil penghitungan final ini tidak jauh dari penghitungan resmi oleh media massa dan lembaga independent Mesir.

Hosni Mubarak tercatat sebagai Presiden pertama dari Pemilihan Presiden Multikandidat. Mantan Kepala Staff Angkatan Udara itu telah berkuasa sejak almarhum Presiden Anwar Saddam tewas terbunuh pada Oktober 1981. Sebelumnya berdasarkan pasal 76 UUD Mesir, pemilihan presiden dimulai dengan pencalonan kandidat oleh parlemen referendum. Referendum pemilihan presiden terakhir berlangsung pada September 1999

---

yang menghasilkan 93,79 % suara bagi Hosni Mubarak, dengan 79 % dari total pemilih menggunakan hak pilihnya.<sup>13</sup>

Perbedaan partisipasi pemilihan presiden sampai akhir 1999 sangat signifikan di banding dengan pemilu pertama Multikandidat. Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 23 % dari 31,83 juta pemilih yang terdaftar dalam pemilihan presiden secara langsung tersebut.<sup>14</sup> Animo rakyat Mesir untuk pergi ke tempat pemungutan suara sangat rendah. Tanggapan dingin rakyat Mesir terhadap pemilu ini telah menyebabkan banyak pertentangan mengenai kelegalitasan hasil pemilu tersebut. Bahkan banyak pihak saling menuduh hasil pemilu telah direkayasa.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka penulis menarik suatu permasalahan sebagai berikut :

“ Mengapa partisipasi rakyat dalam pemilu Presiden Mesir tahun 2005 rendah ?“.

Padahal sistem pemilihan presiden sudah berubah dari *plebiscite* (calon tunggal) ke multikandidat (banyak calon). Dengan banyaknya calon presiden dimungkinkan pemilih mendapat banyak pilihan dalam memilih pemimpin berikutnya.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup>

### E. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami suatu fenomena yang menjadi pusat perhatian, seorang peneliti biasanya menggunakan alat bantu dalam kerangka dasar pemikiran. Rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilu Mesir 2005 dapat diamati dengan dua pendekatan, yang pertama konsep PERILAKU POLITIK menurut Robert Dahl, dan yang kedua konsep PARTISIPASI POLITIK menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson.

Perilaku politik dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Berkaitan dengan perilaku politik, satu hal yang tidak dapat dipisahkan adalah sikap politik. Dengan pemahaman tentang sikap politik dapat dinyatakan dengan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik. Dengan munculnya sikap politik dapat diperkirakan perilaku politik apa yang akan muncul.

Perilaku politik individu ada yang menerima sebagaimana adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, ada yang melakukan unjuk rasa dan ada pula yang lebih suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa. Seperti yang terjadi di Mesir pada pemilihan presiden multikandidat tahun 2005, rakyat lebih banyak golput dibandingkan dengan yang memilih.

Reaksi seperti itu menarik untuk ditelaah, karena dalam suatu masyarakat di beberapa negara sering dijumpai adanya kelompok yang menamakan dirinya sebagai mayoritas yang diam atau "*Silent Majority*".

singkat bagi panitia pemilihan presiden untuk mengadakan sosialisasi pemilihan presiden multikandidat. Bisa dibayangkan dari bulan Mei sejak amandemen konstitusi pasal 76 sampai awal bulan September yang berkisar hanya 5 bulan, panitia harus mensosialisasikan di 26 propinsi di negara Mesir. Jadi sampai pada hari pemilihan presiden multikandidat, rakyat hanya tahu Hosni Mubarak sebagai calon presiden tunggal.

Kurangnya sosialisasi di masyarakat, menyebabkan kesadaran partisipasi juga ikut rendah. Hal ini dialami oleh pemilih pemula yang baru pertama kali memilih dalam pemilu. Mereka mereka lebih menganggap kegiatan belajar lebih terlihat jelas dibanding ikut dalam kegiatan politik (memilih). Kesadaran politik politik rendah dialami juga oleh masyarakat di perkotaan. Mereka memandang bahwa kegiatan berdagang, bisnis lebih penting dibanding ikut dalam pemilu. Hal ini banyak terjadi di daerah perkotaan. Pada pemilu September lalu menunjukkan bahwa 15 propinsi di Mesir (dari total 26 propinsi) mencatat bahwa pemilih di kota-kota besar cenderung lebih rendah di bandingkan di pedesaan. Hal di atas bisa dikatakan bahwa warga kota yang sudah berpendidikan melihat bahwa pemilu 2005 ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, karena hasil dari pemilu 2005 sudah jelas. Maka dari itu warga kota lebih banyak golput dibanding warga pedesaan.

Partisipasi politik menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi

Pada pemilu sebelum tahun 2005 mobilisasi dalam pemerintahan Hosni Mubarak terjadi dalam kadar yang besar. Hal ini dilakukan pemerintahan Hosni Mubarak agar bisa memberikan peluang-peluang kepemimpinan yang berjalan terus, seperti tersebut dalam point 4 diatas. Dengan porsi mobilisasi yang cukup besar, presiden Hosni Mubarak berhasil mempertahankan posisinya selama 24 tahun walaupun ia seorang yang sangat diktator. Mobilisasi yang dilakukan biasanya berupa intimidasi pada pihak-pihak yang berniat menghalangi pemerintah, kekerasan terhadap kaum oposisi yang ingin memboikot pemilu dan memberikan sejumlah imbalan pada masyarakat yang mencoblos kandidat tertentu.<sup>19</sup>

Dalam kasus yang terjadi tentang rendahnya partisipasi pada saat pemilu presiden, diindikasikan sebagai adanya gerakan yang dinamik dari partisipasi yang dulu dimobilisasi menjadi partisipasi yang lebih otonom dimana rakyat Mesir telah berani mengambil langkah untuk tidak memilih dalam pemilu. Walaupun masih terdapat mobilisasi dari pemerintahan Hosni Mubarak seperti yang terjadi di sebelum 2005 tapi kadarnya mulai menurun.

## **F. Hipotesa**

Rendahnya partisipasi pada pemilu Mesir 2005 disebabkan :

1. Ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah terhadap perubahan sistem pemilu dari ferendum ke sistem multikandidat.

2. Kurangnya Informasi mengenai tata cara pemilihan presiden multikandidat yang mengakibatkan kurangnya kesadaran dari masyarakat Mesir.
3. Tingkat mobilisasi yang menurun.

### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam konteks skripsi ini penelitian di fokuskan pada batasan kurun waktu antara akhir 1999 sampai dengan akhir 2005, agar terjadi pembatasan masalah dan agar permasalahan tidak merambat ke tahun berikutnya. Penelitian ini di mulai pada September 1999 pada saat *plebiscite* pemilihan presiden terakhir sampai pada September 2005 pada pemilu pertama Multikandidat. Tapi tidak menutup kemungkinan mengambil data dari tahun-tahun sebelumnya sebagai tinjauan historis.

### **H. Metode Penulisan**

Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu menjadi ilmu pengetahuan, disamping syarat-syarat yang lain yakni mempunyai objek, sudut pandang terhadap metode serta hasil-hasil pandangannya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat atau sistematis.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data melalui literature, jurnal, buku-buku, Koran dan beberapa pendukung lainnya yang di anggap relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk dengan menggunakan berbagai sumber data dari internet

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab dan pembahasan dalam tiap bab akan dijabarkan lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk karya tulis yang runtut dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama berisi Pendahuluan, meliputi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi Dinamika Partisipasi Politik Rakyat Rakyat Mesir sebelum Tahun 2005 meliputi Tata Cara Pemilihan Presiden melalui Plebiscite yang berisi Pengertian plebiscite dan Langkah-Langkah Pemilihan Presiden melalui plebiscite. Tingkat Partisipasi Rakyat Mesir pada Pemilihan Presiden melalui plebiscite meliputi Partisipasi Periode Gamal Abdul Nasser, Anwar Saddat dan Hosni Mubarak.

Bab Ketiga berisi Pemilu Mesir tahun 2005 dengan Sistem Multikandidat, meliputi yang pertama Transisi Menjelang Pemilu Presiden Mesir 2005, berisi pertama Hasil Amandemen konstitusi pasal 76 meliputi Syarat-syarat Calon Presiden Multikandidat, Pembentukan *Presidential Election Commission*, Ketentuan Proses Pemilu, yang kedua Masa kampanye pemilu presiden Mesir 2005. Yang kedua Pemilu Presiden 7 September 2005.

Dan yang ketiga Pendekatan Partisipasi Pemilu Presiden Mesir 2005

pengambilan keputusan oleh pemerintah.<sup>16</sup> Partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan oleh pelakunya sendiri untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tetapi juga meliputi kegiatan oleh orang lain di luar si pelaku yang juga ingin mempengaruhi pemerintah. Yang pertama dinamakan partisipasi otonom dan yang kedua partisipasi yang dimobilisasi.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui perbedaan antara partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :<sup>18</sup>

1. Perbedaan partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi terletak dalam prinsip dari pada realitas. Tapi batasan ini bersifat dikotomis atau sulit dibedakan secara tajam.
2. Dapat dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran partisipasi yang dimobilisasi dan partisipasi otonom. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah seberapa besar kadarnya.
3. Adanya hubungan yang dinamik antara partisipasi yang otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Artinya bahwa partisipasi yang dimobilisasi bisa menjadi partisipasi otonom begitu juga sebaliknya.
4. Partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi keduanya punya konsekuensi-konsekuensi penting bagi sistem politik. Yaitu partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan kekangan-kekangan terhadap pemimpin politik.

---

<sup>16</sup> ...